



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Sabtu

Tanggal: 16 September 2023

Halaman: 2

Penindakan Gencar, Sampah Liar Tak Kunjung Hilang

YOGYA (KR) - Pemkot Yogya sudah berupaya memberikan edukasi terkait pengelolaan sampah secara mandiri. Begitu pula penindakan terhadap pembuang sampah sembarangan juga cukup gencar dilakukan. Akan tetapi upaya tersebut tak kunjung membuat sampah liar di pinggir-pinggir jalan hilang.

Pantauan pada Kamis (14/9) kemarin, sejumlah tumpukan sampah liar masih ditemukan di beberapa titik. Di antaranya Kricak Tegalrejo, Jalan Jenderal Sudirman serta kawasan Kotabaru. Pada lokasi tersebut sebenarnya juga telah terpampang spanduk imbauan serta ancaman bagi pembuang sampah liar. Meski demikian, tumpukan sampah liar sudah tidak lagi semarak seperti awal darurat sampah yang terjadi di Kota Yogya. "Kami juga melakukan pemantauan di lokasi-lokasi tertentu yang ternyata masih menjadi langganan pembuangan sampah," tandas anggota Forpi Kota Yogya Baharudin, Kamis (14/9).

Baharudin menilai, gencarnya penindakan terhadap pembuang sampah liar se-

harusnya berbanding lurus dengan berkurangnya tumpukan sampah di pinggir-pinggir jalan. Apalagi sepanjang bulan ini sudah ada 43 orang yang diajukan ke meja hijau serta mendapat vonis berupa denda. Di samping itu, kuota Kota Yogya untuk membuang sampah ke TPA Piyungan saat ini sudah ditambah menjadi 135 ton per hari serta operasional depo diperpanjang.

Oleh karena itu ketika sampah-sampah liar masih bermunculan, imbuh Baharudin, maka perlu ada gerakan yang dibangun secara bersama-sama. "Tawaran yang bisa dijadikan solusi adalah melibatkan dari unsur terkecil dari bawah yakni perangkat RT dan kampung. Tidak semua wilayah memiliki lahan

untuk pengelolaan sampah. Sehingga beban tiap wilayah tidak bisa disamaratakan," tandasnya.

Sementara itu penindakan yustisi yang dilakukan Pemkot Yogya terhadap pembuang sampah sembarangan mendapat sorotan dari Fraksi PKS DPRD Kota Yogya. Hal ini lantaran Pemkot dinilai belum sepenuhnya menjalankan amanat perda yang menjadi landasan terkait pengelolaan sampah. Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Yogya Cahyo Wibowo, mengungkapkan dalam perda terkait pengelolaan sampah terdapat klausul mengenai penyediaan sarana dan prasarana. Apalagi di daerah pemukiman padat penduduk, hal itu belum mampu dipenuhi oleh pemerintah. "Kami menilai penerapan sanksi pidana belum bisa diterapkan kepada masyarakat ketika sarana belum dipenuhi," jelasnya.

Cahyo mengaku, pada sidang paripurna Rabu (6/9) lalu pihaknya sempat melakukan interupsi. Sidang paripurna dengan agenda jawaban



KR-Ardhi Wahdan

Tumpukan sampah di Jalan Patimura Kotabaru hampir meluber ke jalan, Kamis (14/9).

walikota atas pandangan umum fraksi itu dinilai belum membahas poin saran dan tuntutan. Selain itu interupsi dilakukan untuk mendorong prioritas anggaran dalam penyediaan sarana prasarana yang menunjang pemilahan sampah di hulu baik yang bersifat organik maupun anorganik. "Saat ini belum jelas

dalam penganggaran, padahal dalam Perda Nomor 10 Tahun 2012 Pasal 9 hal tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," tegasnya.

Selain itu, Fraksi PKS juga menilai Pemkot Yogya tidak boleh menakut-nakuti warganya dengan ancaman penangkapan yang melibatkan Sat Pol PP dan aparat hukum.

Apalagi harus sidang tindak pidana ringan (tipiring) karena semakin membebani perekonomian masyarakat. "Kami berharap Pemkot Yogya jangan hanya kejar tayang terhadap pelanggaran sampah yang Pemkot sendiri belum serius dalam penganggaran yang melibatkan masyarakat," katanya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005